CENTRE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT INDONESIA

E-ISSN 2723-6641

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

# ADAPTASI TEKNOLOGI PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT (PFM) DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUWAWA KABUPATEN BONE BOLANGO

**Nurjana Utina[1], Franky Djafar[2], Dian Fitriani Karim[3]**

[1], [2], [3],Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Email: nurjanautina743@gmail.com

**Submit:**

**Review:**

**Publish:**

**Abstract :** ***Abstract***

*This study is based on the importance of technological adaptation in public financial management to support the implementation of Public Financial Management (PFM) principles in the health service sector. Suwawa Public Health Center (Puskesmas Suwawa), as a primary healthcare facility, manages various funding sources that require effective, transparent, and accountable financial management. However, several obstacles were still identified in its implementation, including limited technological infrastructure, unstable internet networks, administrative delays, and inadequate human resource capacity in operating digital systems. The purpose of this study was to examine the adaptation of financial management technology and its conformity with Public Financial Management (PFM) principles at Suwawa Public Health Center, Bone Bolango Regency. This study employed a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings revealed that the adaptation of financial management technology has undergone a transformation from a manual system to a digital-based system through the implementation of the Regional Government Information System (Sistem Informasi Pemerintah Daerah/SIPD). In terms of the level of adaptation, the use of technology has improved the orderliness of financial recording, reporting transparency, budget execution control, and compliance with administrative procedures. Meanwhile, in terms of the stage of technology adoption, the utilization of SIPD is still at a developing stage because its implementation has not yet been fully consistent and still requires operational adjustments. Therefore, the adaptation of financial management technology has supported the principles of Public Financial Management (PFM), although it still requires stronger infrastructure support and improved human resource competencies to achieve more effective and accountable financial management.*

***Keyword*** *: Technology Adaptation, Financial Management, Public Financial Management, Public Health Center (Puskesmas)*

**Abstrak :** Penelitian ini berangkat dari pentingnya adaptasi teknologi dalam pengelolaan keuangan publik guna mendukung penerapan prinsip-prinsip *Public Financial Management* (PFM) pada sektor pelayanan kesehatan. Puskesmas Suwawa sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama mengelola berbagai sumber dana yang menuntut pengelolaan efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, pelaksanaannya masih ditemukan kendala

CENTRE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT INDONESIA

E-ISSN 2723-6641

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, jaringan internet belum stabil, keterlambatan administrasi, serta kemampuan sumber daya manusia belum memadai menggunakan sistem digital. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui adaptasi teknologi pengelolaan keuangan serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Public Financial Management* (PFM) di Puskesmas Suwawa Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi teknologi pengelolaan keuangan mengalami proses perubahan dari sistem manual menuju sistem berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Dari sisi tingkat adaptasi, penggunaan teknologi meningkatkan keteraturan pencatatan, transparansi pelaporan, kontrol pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan prosedur administrasi. Sementara itu, dari sisi tahap adopsi teknologi, pemanfaatan SIPD masih berada pada tahap berkembang karena penggunaannya belum konsisten dan masih memerlukan penyesuaian operasional. Dengan demikian, adaptasi teknologi pengelolaan keuangan telah mendukung prinsip-prinsip PFM, namun masih memerlukan penguatan infrastruktur dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar pengelolaan keuangan lebih efektif dan akuntabel.

**Kata Kunci** : Adaptasi Teknologi, Pengelolaan Keuangan, Public Financial Management, Puskesmas

**Citation :**

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan publik (Public Financial Management/PFM) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara dan daerah untuk pelayanan masyarakat. Kualitas pengelolaan keuangan menentukan apakah anggaran dapat digunakan secara efektif, transparan, dan akuntabel atau justru menimbulkan penyimpangan. Secara global, penguatan PFM dilakukan melalui berbagai reformasi, salah satunya dengan penerapan sistem digital dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat penyajian data, dan memperkuat transparansi pengelolaan keuangan (Kristensen et al., 2019).

Di Indonesia, reformasi pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan melalui penerapan sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Namun, berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa masih terdapat banyak masalah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Permasalahan tersebut mencakup ketidakpatuhan administrasi, lemahnya pengawasan, serta kerugian negara yang sebagian besar terjadi di pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa adaptasi teknologi pengelolaan keuangan masih perlu diperkuat agar tata kelola keuangan menjadi lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

Di Provinsi Gorontalo, permasalahan pengelolaan keuangan juga pernah ditemukan pada laporan pertanggungjawaban belanja daerah yang nilainya tidak dapat diyakini sepenuhnya kebenarannya. Sementara itu, di Kabupaten Bone Bolango terjadi perkembangan dalam pengelolaan APBD, terutama pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perubahan struktur belanja yang mulai memberi ruang lebih besar pada pelayanan publik dan pembangunan. Dalam sektor kesehatan, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan sebagian anggaran untuk mendukung pelayanan kesehatan, termasuk operasional Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (Lestari & Prabowo, 2024).

Puskesmas Suwawa sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bone Bolango mengelola berbagai sumber dana, seperti dana kapitasi JKN, dana operasional kesehatan, dan dukungan APBD. Pengelolaan dana tersebut menuntut adanya sistem administrasi dan pelaporan yang tertib agar seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan tepat waktu. Karena itu, penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan menjadi kebutuhan penting untuk mendukung efektivitas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi dan sistem digital dalam pengelolaan keuangan di Puskesmas Suwawa sudah mulai diterapkan, tetapi belum optimal. Kendala yang ditemukan antara lain jaringan internet yang tidak stabil, perangkat komputer yang terbatas, serta kemampuan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan berbasis teknologi. Selain itu, perubahan regulasi yang cukup dinamis juga belum sepenuhnya diikuti dengan penyesuaian prosedur kerja dan peningkatan kapasitas pegawai.

Berdasarkan kondisi tersebut, adaptasi teknologi pengelolaan keuangan di Puskesmas Suwawa perlu dikaji lebih mendalam dalam perspektif Public Financial Management (PFM). Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses adaptasi teknologi berlangsung, faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya, serta sejauh mana penerapan teknologi tersebut mampu memperkuat efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Puskesmas Suwawa Kabupaten Bone Bolango.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam proses adaptasi teknologi pengelolaan keuangan dalam perspektif Public Financial Management (PFM) di Puskesmas Suwawa Kabupaten Bone Bolango. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengalaman, praktik, serta kendala yang terjadi dalam penggunaan sistem informasi keuangan di lingkungan puskesmas. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami kondisi nyata di lapangan secara lebih menyeluruh melalui pandangan dan pengalaman para informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan (Creswell, 2019).

Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Suwawa Kabupaten Bone Bolango selama tiga bulan, yaitu November 2025 sampai Januari 2026. Kehadiran peneliti dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan aktivitas pelayanan kesehatan dan administrasi di lokasi penelitian agar proses penelitian tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan sistem informasi keuangan, seperti kepala puskesmas, bendahara, operator sistem, staf administrasi, dan pihak dinas kesehatan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen keuangan, laporan anggaran, arsip administrasi, dan data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digunakan untuk mendukung dan memverifikasi hasil wawancara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas pengelolaan keuangan dan penggunaan aplikasi keuangan di puskesmas secara langsung. Wawancara dilakukan secara fleksibel sesuai ketersediaan informan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait penggunaan teknologi pengelolaan keuangan. Selain itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti laporan keuangan, bukti transaksi, dan dokumen kegiatan yang relevan dengan penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung agar data yang diperoleh dapat disusun secara sistematis dan menghasilkan temuan yang relevan. Melalui proses tersebut, peneliti dapat memahami hubungan antara penggunaan teknologi keuangan dengan penerapan prinsip-prinsip PFM di lingkungan Puskesmas Suwawa (Miles, Huberman, & Saldana, 2020).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya. Penelitian juga dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pra lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data, serta evaluasi dan pelaporan hasil penelitian sehingga proses penelitian berjalan secara sistematis dan terarah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan di Puskesmas Suwawa menunjukkan adanya perubahan dari sistem manual menuju sistem berbasis digital melalui penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Penggunaan sistem ini membantu proses pencatatan, pelaporan, dan pemantauan penggunaan anggaran menjadi lebih terstruktur dibandingkan sebelumnya. Dalam perspektif Public Financial Management (PFM), transformasi digital merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan publik

agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel (Kristensen et al., 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi mulai mengubah pola administrasi keuangan di tingkat pelayanan kesehatan dasar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIPD membantu meningkatkan keandalan anggaran di Puskesmas Suwawa. Setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang direncanakan telah dihubungkan dengan alokasi anggaran dalam sistem sehingga memudahkan pemantauan realisasi anggaran secara berkala. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem digital tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian penggunaan dana agar tetap sesuai dengan perencanaan kegiatan. Cangiano et al. (2019) menjelaskan bahwa keandalan anggaran merupakan indikator penting dalam PFM karena mencerminkan kemampuan organisasi dalam menjaga kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.

Selain itu, penggunaan sistem informasi keuangan juga memperkuat keterpaduan antara proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Dalam praktiknya, data penggunaan anggaran dapat dipantau lebih cepat dibandingkan sebelumnya yang masih bersifat manual. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Rahman dan Suryanto (2022) yang menyebutkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan keuangan publik mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan dalam organisasi pemerintah.

Meskipun demikian, keandalan anggaran belum sepenuhnya optimal karena pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan sering mengalami penyesuaian sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. Beberapa kegiatan membutuhkan perubahan waktu maupun bentuk pelaksanaan sehingga realisasi anggaran tidak selalu sesuai dengan rencana awal. Dalam perspektif PFM, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran sektor publik harus memiliki fleksibilitas tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas (International Monetary Fund, 2023). Oleh karena itu, sistem digital perlu mampu mendukung kebutuhan pelayanan yang bersifat dinamis.

Penelitian juga menemukan bahwa penggunaan sistem informasi keuangan mulai meningkatkan transparansi pengelolaan dana di Puskesmas Suwawa. Informasi penggunaan anggaran menjadi lebih mudah dipantau oleh pimpinan karena data transaksi telah tercatat dalam sistem dan dapat dilihat secara berkala. Sebelumnya, informasi penggunaan anggaran baru dapat diketahui setelah laporan selesai disusun secara manual. Temuan ini mendukung pandangan Utami dan Hapsari (2022) yang menyatakan bahwa digitalisasi sistem keuangan mampu meningkatkan keterbukaan informasi dan memperkuat transparansi pengelolaan dana publik.

Selain meningkatkan transparansi, sistem digital juga membantu proses penyusunan laporan keuangan karena sebagian pencatatan telah dilakukan secara otomatis melalui aplikasi. Hal ini memperlihatkan bahwa penggunaan teknologi memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi keuangan di tingkat puskesmas. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sari dan Rahmawati (2021) yang menjelaskan bahwa implementasi sistem informasi keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan pemerintah melalui pencatatan data yang lebih sistematis dan terintegrasi.

Namun demikian, transparansi digital di Puskesmas Suwawa masih menghadapi beberapa kendala teknis dan administratif. Tidak semua transaksi dapat langsung diinput ke dalam sistem karena petugas harus mengumpulkan dokumen kegiatan terlebih dahulu sebelum melakukan pencatatan. Selain itu, keterbatasan jaringan internet dan perangkat komputer juga sering menghambat proses input data keuangan. World Bank (2023) menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan publik sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi dan dukungan organisasi dalam menjalankan sistem digital secara berkelanjutan.

Dalam aspek kontrol pelaksanaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Suwawa telah memiliki mekanisme pengendalian penggunaan anggaran melalui prosedur administrasi, verifikasi dokumen, serta pemeriksaan laporan kegiatan. Setiap kegiatan yang menggunakan dana harus melalui proses persetujuan pimpinan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung sebelum dicatat dalam sistem. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa kontrol pelaksanaan sudah berjalan secara administratif dan menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan puskesmas. Temuan ini sesuai dengan konsep Hughes (2018) yang menyatakan bahwa pengendalian administrasi merupakan elemen utama dalam manajemen pelayanan publik modern.

Walaupun demikian, efektivitas kontrol pelaksanaan masih dipengaruhi oleh keterlambatan penyerahan dokumen kegiatan oleh pelaksana program. Dalam beberapa kasus, laporan kegiatan dan bukti penggunaan dana baru diserahkan setelah kegiatan selesai cukup lama sehingga proses pencatatan keuangan menjadi tertunda. Kondisi ini menyebabkan kontrol penggunaan dana belum dapat dilakukan secara optimal dan real time sebagaimana yang diharapkan dalam sistem pengelolaan keuangan berbasis digital. Cordella dan Tempini (2020) menjelaskan bahwa penerapan e-government tidak hanya memerlukan teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja dan kedisiplinan organisasi agar sistem dapat berjalan efektif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan keuangan di Puskesmas Suwawa secara umum telah diterapkan melalui aturan administrasi yang berlaku. Pelaksana kegiatan diwajibkan membuat rencana kegiatan, menyusun laporan, dan melengkapi bukti penggunaan dana sesuai ketentuan. Penggunaan SIPD turut membantu meningkatkan keteraturan administrasi karena setiap transaksi harus disertai dokumen pendukung sebelum diinput ke dalam sistem. Temuan ini mendukung pendapat Hidayat dan Sari (2021) yang menyatakan bahwa penerapan e-government berpengaruh positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan kepatuhan administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Di sisi lain, kepatuhan terhadap prosedur masih menghadapi tantangan karena sebagian besar petugas yang mengelola keuangan berlatar belakang tenaga kesehatan, bukan keuangan atau teknologi informasi. Kondisi tersebut menyebabkan proses adaptasi terhadap sistem digital membutuhkan waktu dan penyesuaian. Guenduez et al. (2020) menjelaskan bahwa keberhasilan penggunaan teknologi dalam administrasi publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dalam memahami dan mengoperasikan sistem digital. Dengan demikian, keterbatasan kompetensi teknis menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan SIPD di Puskesmas Suwawa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi teknologi pengelolaan keuangan di Puskesmas Suwawa telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan keandalan anggaran, transparansi, kontrol pelaksanaan, dan kepatuhan prosedur dalam perspektif Public Financial Management (PFM). Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, serta dinamika pelayanan kesehatan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelatihan, dukungan infrastruktur, dan peningkatan disiplin administrasi agar pemanfaatan sistem informasi keuangan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung tata kelola keuangan publik yang lebih baik. Temuan ini sejalan dengan Andrews et al. (2020) yang menekankan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi dan digitalisasi sektor publik sangat bergantung pada penguatan kapasitas organisasi dan kemampuan adaptasi institusi terhadap perubahan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, adaptasi teknologi pengelolaan keuangan di Puskesmas Suwawa Kabupaten Bone Bolango menunjukkan adanya perubahan dari sistem manual menuju sistem berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Penerapan sistem tersebut telah membantu meningkatkan keandalan anggaran, transparansi, kontrol pelaksanaan, dan kepatuhan prosedur dalam pengelolaan keuangan. Dari sisi keandalan anggaran, penggunaan SIPD mempermudah proses perencanaan, pencatatan, dan pemantauan penggunaan anggaran secara lebih terstruktur sehingga realisasi anggaran dapat dipantau secara berkala. Dalam aspek transparansi, sistem digital membantu proses pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi lebih sistematis dan mudah diakses oleh pimpinan maupun pihak terkait. Selain itu, kontrol pelaksanaan pengelolaan keuangan juga mengalami perkembangan melalui mekanisme verifikasi dokumen, pencatatan transaksi, dan pengawasan penggunaan anggaran yang dilakukan melalui sistem digital. Pada aspek kepatuhan prosedur, penggunaan SIPD membantu meningkatkan keteraturan administrasi keuangan karena setiap transaksi dan penggunaan dana harus didukung oleh dokumen administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun demikian, implementasi adaptasi teknologi pengelolaan keuangan di Puskesmas Suwawa belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti keterbatasan jaringan internet, perangkat komputer yang belum memadai, keterlambatan penyampaian dokumen administrasi, serta kemampuan sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan dalam penggunaan sistem digital. Selain itu, dinamika pelayanan kesehatan di lapangan juga menyebabkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sering memerlukan penyesuaian sehingga proses pencatatan dan pelaporan belum selalu berjalan secara real time. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tahap adopsi teknologi pengelolaan keuangan di Puskesmas Suwawa masih berada pada tahap berkembang dan masih memerlukan penguatan dalam implementasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan infrastruktur teknologi, serta peningkatan kedisiplinan administrasi agar penerapan sistem informasi keuangan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip Public Financial Management (PFM).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak Puskesmas Suwawa Kabupaten Bone Bolango yang telah memberikan izin dan membantu proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para informan penelitian yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang diperlukan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, terima kasih kepada dosen pembimbing, rekan-rekan, serta seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Gorontalo sebagai almamater yang telah memberikan dukungan akademik dan motivasi selama proses penyusunan artikel ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan publik dan pelayanan kesehatan.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penulis menyatakan bahwa seluruh proses penelitian, mulai dari penyusunan konsep penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga penulisan artikel dilakukan oleh penulis sendiri. Penulis juga bertanggung jawab penuh terhadap isi, hasil, dan keaslian artikel ini. Dalam proses penyusunan artikel, penulis memperoleh arahan dan masukan akademik dari dosen pembimbing, namun seluruh interpretasi data, pembahasan, dan penyusunan naskah tetap menjadi tanggung jawab penulis.

## REFERENSI


Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2020). *Building state capability: Evidence, analysis, action*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198747482.001.0001

Bahar, A. (2018). Analisis pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Kecamatan Mappakasunggu. *Jurnal Profitability, 2*(1). https://doi.org/10.26618/profitability.v2i1.1956

Bannister, F., & Connolly, R. (2022). The future of digital government. *Information Polity, 27*(1), 1–15. https://doi.org/10.3233/IP-210015

Cangiano, M., Curristine, T., & Lazare, M. (2019). *Public financial management and its emerging architecture*. International Monetary Fund. https://doi.org/10.5089/9781484365229.001

Cordella, A., & Tempini, N. (2020). E-government and organizational change in the public sector. *Government Information Quarterly, 37*(3), Article 101497. https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101497

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2019). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.

Fadli, M., & Kadir, A. (2021). Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 24*(3), 145–154. https://doi.org/10.22146/jmpk.v24i3.66354

Guenduez, A., Mettler, T., & Schedler, K. (2020). Technological frames in public administration. *Government Information Quarterly, 37*(4), Article 101520. https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101520

Hidayat, T., & Sari, M. (2021). Pengaruh penerapan e-government terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Administrasi Publik, 17*(2), 201–215. https://doi.org/10.20473/jap.v17i2.2021.201-215

Hughes, O. E. (2018). *Public service management*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-137-55269-3

International Monetary Fund. (2023). *Digital solutions guidelines for public financial management* (Technical Notes and Manuals No. 2023/007). International Monetary Fund. https://www.imf.org/en/publications/tnm/issues/2023/10/06/digital-solutions-guidelines-for-public-financial-management-537781

Kristensen, J. K., Bowen, P., Long, C., & Mustapha, S. (2019). *PEFA, public financial management, and good governance*. World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/d3e09a49-393f-5a72-9885-88dde274c59c

Krause, P., Sweet, S., & Ter-Minassian, T. (2021). Public financial management reform and digitalization. *Public Administration Review, 81*(6), 1046–1057. https://doi.org/10.1111/puar.13321

Kurniawan, B., & Yuliani, N. (2023). Sistem informasi manajemen keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Akuntansi Publik, 8*(1), 66–79. https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.7286

Lestari, D., & Prabowo, H. (2024). Implementasi sistem informasi keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana kesehatan. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 13*(2), 90–102. https://doi.org/10.22146/jkki.89412

Luna-Reyes, L., & Gil-Garcia, J. (2021). Digital government transformation and public sector management. *Government Information Quarterly, 38*(3), Article 101618. https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101618

Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly, 36*(4), Article 101385. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.

Mochdar, S. (2021). *Analisis pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar menggunakan framework TAM* (Skripsi).

Pratama, A., & Nugroho, R. (2020). Digitalisasi pengelolaan keuangan sektor publik dalam meningkatkan transparansi pemerintah daerah. *Jurnal Borneo Administrator, 16*(3), 295–310. https://doi.org/10.24258/jba.v16i3.656

Rahman, A., & Suryanto. (2022). Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 19*(1), 45–58. https://doi.org/10.46730/jiana.v19i1.7942

Rahmawati, Y. H., Roesminingsih, E., & Hariyati, N. (2022). Analisis pengelolaan administrasi keuangan sekolah (studi kasus pada SMP Lab Unesa). *Jurnal Manajemen Pendidikan*.

Santoso, H., & Prasetyo, B. (2020). Pengaruh teknologi informasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 11*(2), 137–150. https://doi.org/10.22212/jekp.v11i2.1675

Sari, D. P., & Rahmawati, E. (2021). Implementasi sistem informasi keuangan daerah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 18*(2), 123–138. https://doi.org/10.21002/jaki.2021.07

Sarjito, A. (2024). *Dasar-dasar administrasi publik*. Indonesia Emas Group.

Utami, W., & Hapsari, A. (2022). Digitalisasi sistem keuangan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana publik. *Jurnal Akuntansi dan Governance, 3*(1), 45–60. https://doi.org/10.24815/jag.v3i1.25847

Wibowo, A., & Putri, R. (2019). Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10*(3), 488–501. https://doi.org/10.18202/jamal.2019.12.10029

World Bank. (2023). *Digital transformation of public financial management*. World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1890-1